

**RENCANA KERJA (RENJA) PENYELARASAN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Penyelarasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rencana kerja Penyelarasan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ini merupakan penyelarasan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh DPKPLH sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancanmgan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pmbangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan renja penyelarasan tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang sudah diselaraskan dengan bagian organisasi, inspektorat dan baperlitbang sebagai dokumen perencanaan untuk dilaksanakan di tahun 2024.

Dengan adanya Renja Penyelarasan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara agar lebih terarah, tempat sasaran dan tempat waktu.

Banjarnegara, Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. TULUS SUGIHARTO, M.Si
NIP. 19670217 199303 1 010

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
4.1 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	81
4.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	82
4.3 Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	85
BAB V PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Penyelarasan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.754.034.400 sesuai dengan KUA PPAS dengan memperhatikan kas daerah yang tersedia di Kabupaten Banjarnegara. Fokus utama pada Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar meliputi infrsatructur Sarana Air Bersih dan Limbah, Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya rumah tinggal yang dilengkapi dengan sanitasi
2. Masih terdapat daerah yang kekurangan air bersih di Kabupaten Banjarnegara
3. Masih perlu diadakan relokasi bagi warga korban bencana termasuk relokasi atas tanah dan rumah tinggal yang layak huni, termasuk penyediaan PSU
4. Masih perlunya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5. Masih belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
7. Masih belum optimalnya pengelolaan TPS 3R yang ada
8. Masih terdapat daerah yang belum memiliki saluran air limbah sesuai standar kesehatan

9. Masih ditemui limbah industri yang di buang ke sungai, sehingga menyebabkan pencemaran sungai
10. Masih ditemuinya pencemaran air, pencemaran udara dan pencemara tanah.

Dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 21.754.034.400.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa refocusing, perubahan/ pergeseran yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/ kegiatan/ sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Fasiliatsi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin lingkungan dan/ atau Izin PPLH Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tamsil/ TPP PNS Bulan Desember 2023 dibayarkan/ dicairkan di bulan Januari 2024

2. Tamsil/ TPP PTT Bulan Desember 2023 dibayarkan/ dicairkan di bulan Januari 2024
 3. Keterlambatan Pengesahan perubahan/ pergeseran anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan
 4. Rasionalisasi anggaran pengawasan Lingkungan Hidup sehingga target pengawasan Lingkungan Hidup tidak dapat di capai
 5. Refocusing anggaran pada tahun 2023 yang menyebabkan program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan optimal
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah (SPM)
 3. Kegiatan Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ kota
 4. Kegiatan Perencanaan, Peanganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
 5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 8. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten/ kota
 9. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota (SPM)
 10. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
 11. Program Kawasan Permukiman
 12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 13. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan lingkungan hidup
 14. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)

15. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota
 16. Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat, Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcapaian tersebut antara lain adalah:
1. Belum adanya alokasi pendanaan untuk pendataan PSU baik yang dikelola oleh dinas maupun PSU lingkungan oleh pemerintah desa
 2. Kurangnya upaya pengelolaan oleh KPSPAM/BPSPAM/KPP terkait pemeliharaan, pengoprasian dan pengembangan jaringan layanan
 3. Pengelolaan air bersih yang kurang layak dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat dikarenakan tidak adanya BOP
 4. Pelaksanaan pendataan rumah korban bencana sebelum dan sesudah kejadian tidak tepat waktu (SPM)
 5. Meningkatnya volume sampah plastik baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun bukan
 6. Masih kurangnya pengelolaan di bidang RTH

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka diperlukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran khususnya untuk program SPM dan program diluar SPM, diantaranya:

1. Alokasi pendanaan untuk penyusunan dokumen data dukung SPAM menjadi satu data (SPM)
2. Perlunya pendataan rumah tangga yang sudah terlayani sanitasi dan belum terlayani (SPM)
3. Perlunya percepatan pendataan rumah korban bencana baik yang sudah tertangani maupun belum (SPM)
4. Relokasi wilayah rawan bencana, sehingga perlu dianggarkan anggaran pada tahun 2024 (SPM)

5. Pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari berbagai aspek yang ada pada kegiatan di lingkungan hidup

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (TW II)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		-					-	-	-
1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang									
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan ketersediaan akses air minum	100%							
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah	97,73%							
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		

		Minum (SPAM) yang disusun							
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang					100 Orang	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	28,5 Liter/detik					Liter/detik	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	32,46 Liter / detik		507 Liter / detik			750 Liter / detik	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit		10 Unit			10 Unit	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000 SR		1.000 SR			1.000 SR	
1.03.05	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses sanitasi atau air limbah	66,89						
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sanitasi/ air	77,63						

		limbah yang memadai								
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5,50 M ³ /Hari			1.200 Rumah Tangga			M ³ /Hari	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang							
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%							
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	13 Dokumen							
1-04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dok			7 Dok			7 Dok	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	6 Laporan			6 Laporan			6 Laporan	

		kinerja SKPD							
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%						
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	125 oraang / bulan		115 orang / bulan			125 oraang / bulan	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket						
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan	13 Paket		13 Paket			13 Paket	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 Unit						
1.04.01.2.08.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	22 Unit		22 Unit			22 Unit	

1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	37 Laporan							
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan		36 Laporan			36 Laporan		
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 Laporan		25 Laporan			25 Laporan		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	25 Unit							
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit		23 Unit			23 Unit		
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit		2 Unit			2 Unit		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana	100%							
1-04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi	3 Dok							

	Kabupaten/Kota	rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota								
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok					Dok		
1-04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 orang							
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 orang		100 orang			100 orang		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	100%							

		Kabupaten/ Kota								
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	40 Unit Rumah		100 Unit Rumah			150 Unit Rumah		
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan							
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	55,35%							
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah izin yang di terbitkan	1 Laporan							
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1-04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP	1 Dok							
1-04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi	Jumlah Dokumen	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

	Kebijakan Bidang PKP	Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi							
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%						
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	2.500 Unit Rumah		1.339 Unit Rumah			2.500 Unit Rumah	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 Lap		1 Lap			1 Lap	
1-04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dok		1 Dok			1 Dok	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha		25 Ha			25 Ha	
1-04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	59,89%						
1-04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni	79 Unit						

	pada Daerah Kabupaten/Kota	yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha								
1-04.04.2.01.0001	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Unit		64 Unit			Unit		
1-04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	20%							
1-04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum di perumahan	100%							
1-04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi		10 Lokasi			10 Lokasi		
1-04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan	1 Lap		1 Lap			1 Lap		

		prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan								
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1-04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase meningkatnya Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang perumahan dan Kawasan permukiman	100%							
1-04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil	1 Lap							
1-04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun	100%							

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH	4 Dok						
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	3 Dok		3 Dok			3 Dok	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok		1 Dok			1 Dok	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis	1 Dok						
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dok		1 Dok			1 Dok	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terukurnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	100%						
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1 Dok						
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen	1 Dok		1 Dok			1 Dok	

	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang tertangani	18,5%							
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas ruang terbuka hijau (RTH)	7%							
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota	5,2 Ha		5,2 Ha			5,2		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%							
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH	20 Dok							
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dok		20 Dok			20 Dok		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	Jumlah dokumen pembinaan dan	60%							

	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH								
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup	18 lembaga							
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga	-	18 Lembaga	-	-	18 Lembaga	-	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup	75%							
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat	Jumlah penghargaan	18 Entitas							

	Daerah Kabupaten/Kota	lingkungan hidup tingkat daerah kab/ Kota								
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas		18 Entitas			18 Entitas		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah di wilayah layanan persampahan	33,5%							
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	77,91%							
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok		20 Kelompok			20 Kelompok		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

		untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada								
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7,2 Ton		260 Ton			270 Ton		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 35 Indikator. Dari 35 indikator tersebut, 28 berstatus tercapai dan 7 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum adanya perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dokumen data dukung SPM
2. Sumber air baku mengalami penyusutan debit air bahkan sebagian kering sehingga mempengaruhi kapasitas produksi/layanan
3. Capaian akses layanan air bersih sampai ke tingkat rumah tangga masih rendah
4. Belum adanya pendanaan untuk pendataan PSU baik yang dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa
5. Belum digantinya lahan kas desa yang dipakai sebagai relokasi, untuk 6 lokasi, baru dapat dilakukan penggantian 3 lokasi
6. Meningkatnya volume sampah plastik dan pengurangan sampah dari sumbernya belum optimal
7. Kurangnya perencanaan proses pengadaan sehingga memakan waktu yang lama
8. Adanya refocusing anggaran sehingga merubah target serta capaian kinerja

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan evaluasi mengenai program yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya
2. Membagi pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan berdasarkan urutan prioritas
3. Mengoptimalkan pengolahan kembali / daur ulang sampah plastik

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023 (SM I)	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	SPM	-	98.3%	100%	100%	100%	95.73%		98.3%	100%	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM		72%	73%	75%	80%	71.99%		72%	73%	
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (pelaksanaan dilakukan oleh kementerian PUPR)	SPM		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Pelaksanaan dilakukan oleh kementriaan PUPR)		IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		IKK	27.67%	55.35%	83.03%	100%	35.90 %		27.67%	55.35 %	
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		IKK	82%	89%	90%	91%	87.13 %		82%	89%	
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		IKK	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	15 Lokasi			10 Lokasi	10 Lokasi	
8	Persentase jumlah rumah tangga yang Mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	SPM	IKK	98.3%	100%	100%	100%	95.73%		98.3%	100%	
9	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM		72%	73%	75%	80%	71.99%		72%	73%	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten		IKK	67.5	68.5	68.75	69	64.08		67.5	68.5	
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							64.08				
12	Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)							56.9				
13	Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)							82.9				
14	Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)							65.2				
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		IKK	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	23 Dok		20 Dok	20 Dok	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024-2028, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan dengan bidang urusan meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 33.569 unit;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 21,79 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, Konflik kawasan hutan, Keanekaragaman hayati , Penurunan Kualitas Lingkungan dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh: terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah, kerusakan lahan akibat cara budidaya yang salah, bertambahnya jumlah industri yang berpotensi menghasilkan limbah, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu peningkatan Perizinan dan pengawasan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup , peningkatan peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas

lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

6. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak memiliki akses sanitasi dan air minum / air bersih yang berstandar kesehatan)
7. Perlu Kerjasama Lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, RTLH dan Air minum, sanitasi, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
8. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pentingnya lingkungan yang bersih bebas polusi, udara, air dan bagaimanamembuang sampah pada tempatnya dan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak berkurangnya RTLH, dan akan smakin bertambah
2. Menurunnya tingkat kesehatan akibat minimnya air minum/ air bersih dan akses sanitasi yang tidak memadai sesuai standar kesehatan
3. Tidak berkurangnya wilayah permukiman kumuh, dan akan smakin bertambah luas wilayah perkumuhan
4. Pencemaran kualitas air, tanah dan udara smakin meningkat
5. Berkurangnya pengawasan terhadap kajian Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan inovasi baru khususnya penggunaan teknologi digital pada perangkat daerah terkait untuk menunjang percepatan pengolahan data

2. Banyaknya inovasi inovasi dari masyarakat terkait sampah rumah tangga yang masih dapat dimanfaatkan , bisa menjadi kerajinan berupa sampah daur ulang hingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar,

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 34.569 unit;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 21,79 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur
5. Perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan penyelenggaraan infrastruktur daerah untuk menghubungkan antar wilayah potensi, dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat, serta membuka akses lapangan kerja baru dengan prioritas:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten melalui optimalisasi rekonstruksi jalan;
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap beban berlebih kendaraan;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan irigasi;

- d. Mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 - e. Mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- a. Menguatkan lembaga, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan penanganan panen dan pasca panen pertanian dan perikanan;
 - d. Menguatkan kelembagaan di sektor pariwisata;
 - e. Menguatkan industri kreatif dalam pengembangan pariwisata;
 - f. Meningkatkan Kerjasama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata;
 - g. Fasilitasi penyelesaian konflik perusahaan dan pekerja;
 - h. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual;
 - i. Meningkatkan volume perdagangan luar negeri;
 - j. Menjamin kecukupan pasokan dan pemerataan distribusi barang;
 - k. Penguatan manajemen cadangan pangan;
 - l. Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat;
 - m. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sanitasi;
 - n. Memperkuat pengendalian mutu pendidikan;
 - o. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan;
 - p. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, Upaya Percepatan Penurunan Stunting, kesehatan kerja dan olahraga;
 - q. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembiayaan Kesehatan
 - r. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - s. Fasilitasi pengiriman dan penempatan transmigrasi.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi
- a. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;

4. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman yang berada di aset Pemda.
5. Melakukan pendataan terhadap PSU perumahan baik yang di kelola oleh pengembang maupun yang berada di kawasan permukiman di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Banjarnegara	Persentase akses cakupan air minum	100%	6.740.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Banjarnegara	Persentase akses cakupan air minum	100%	10.385.728	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk berakses air minum	100%	6.740.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk berakses air minum	97,73%	10.385.728	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dok	100.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dok	15.000	

			yang disusun			Minum (SPAM)		yang disusun			
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dok	110.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	14.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	800 SR	3.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	28,5 Liter/detik	85.000	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	750 Liter/detik	2.190.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	32,46 Liter/detik	15.000	
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Lokasi	340.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Lokasi	2.059.951	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan	1.000 SR	1.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.000 SR	8.196.777	

			penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				Jaringan Perpipaan			
	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBAN-NGAN SISTEM AIR LIMBAH					PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBAN-NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi atau air limbah	66,89%	10.809.493	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KK terlayani pengelolaan sistem air limbah	73%		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sanitasi/ air limbah yang memadai	77,63%	10.809.493	
	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dok	120.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	50 Orang	385.000	
	Pembangunan/Penye- diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.200 Rumah Tangga	1.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ /Hari	10.424.493	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	13.621.324	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		SAKIP	67,25%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	14.648.472	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	67,25%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	13 Dok	25.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	15.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat		Persentase adminstrasi	72%		Administrasi Keuangan		Persentase tersedianya	100%	10.491.119	

	Daerah		Keuangan Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		administrasi keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	10.804.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang/bulan	10.382.204	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	255.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	108.915	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket	451.110	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	425.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	421.141	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diediakan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diediakan	22 Unit	5.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	22 Unit	200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	22 Unit	5.000	

			atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	37 Laporan	2.655.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.021.243	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1.082.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	938.844	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	141.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	82.398	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penanganan rumah korban bencana	100%	1.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kab/Kota	3 Dok		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kab/Kota	3 Dok	750.000	
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	750.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Dok	45.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dok	0	
	Pengumpulan Data Rumah Korban		Jumlah Dokumen Data	1 Dok	20.000	Pengumpulan Data Rumah		Jumlah Dokumen Data	1 Dok	0	

	Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	0	
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	100 Orang	50.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	0	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100%	250.000	
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan		Jumlah lahan untuk	3 Ha	9.500.000						

	Rumah bagi Korban Bencana		pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota								
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	150 unit	1.500.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	150 unit	250.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	30.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	0	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase permukiman yang tertata			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	55,35%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		
	Koordinasi dan		Jumlah Laporan	1 Laporan	25.000	Koordinasi dan		Jumlah Laporan	1 Laporan		

	Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Permukiman Kumuh			
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP	1 Dok		
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dok	50.000	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dok		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.500 unit	3.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.500 unit		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah luas pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	25 Ha	2.810.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha		
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	27.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	2.500 unit	2.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman	100 unit		

	di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki			
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				250.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				250.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	80.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	250.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lap		

	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap	50.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	1 Laporan	20.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan	1 Laporan	3.000	

	Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dok	155.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok	0	

	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	3 Dok	100.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	3 Dok		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen	150.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen	150.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	260.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,	1 Dok	10.000	

	Tanah, Air, Udara, dan Laut					Tanah, Air, Udara, dan Laut		Udara, dan Laut			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragama n hayati (KEHATI)			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (KEHATI)			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaraga- man Hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,2 Ha	950.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,2 Ha	50.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			

	Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	125.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	11.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				446.050	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan		Jumlah Lembaga/kelempok Masyarakat/Instansi yang	18 Lembaga	200.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/	18 Lembaga	15.000	

	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	150.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	50.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass	100.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass	15.000	

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan area pelayanan sampah			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan area pelayanan sampah			
Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan sampah			Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan sampah			
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	600.000	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	244.000	
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST /SPA Kabupaten /Kota	270 Ton	800.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	270 Ton	547.510	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	250.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	17.567	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dok	250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dok	250.511	

	dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota				
	Sub kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Dusun Bulukuning dan Dusun Sabrangkidul Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/ SPAM berbasis masyarakat	SR	Rawan kekurangan air di musim kemarau
		RT 02 RW 05 Wangon, Kecamatan Banjarnegara			Pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau
		RT 010 RW 011, Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara			Belum tersedia sarana air bersih
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				
	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten / kota				
	Sub kegiatan pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	RW. 04, Wangon Kecamatan Banjarnegara	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	ODF Kelurahan Wangon baru 96%, blm bisa mencapai 100% karena terdapat 1 lokasi permukiman yang

					membutuhkan penanganan teknis khusus dan membutuhkan biaya besar untuk pembangunan jamban.
3	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha				
	Sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit Rumah	Masih terdapat sejumlah rumah di Ampelsari yang belum layak huni
		Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara			Masih adanya rumah tidak layak huni
		RT.01 RW. 07, Wangon, Kecamatan Banjarnegara			Ada 3 rumah di wilayah RT. 01 RW. 07 yang belum layak dikategorikan rumah sehat
		Kel. Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara			Masih adanya rumah yang tidak layak huni
		Rt.02 Rw.09, Krandedan Kecamatan Banjarnegara,			Tidak memiliki rumah yang layak
4	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	RT. 02/07, Wangon Kecamatan Banjarnegara	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ton	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaunan Ulang dan Pemanfaatan Kembali

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun Lawangsari Desa Semangkung, Kab. Banjarnegara			
		Desa Gembol Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara			
		Wanatangi Desa Sambong Kec.Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Desa Bandingan Kec.Rakit, Kab. Banjarnegara			
		RW II (2) Kelurahan Semampir Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Ds. Bandingan Kec camatan Rakit, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Wanatangi Dsa Sambong Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Rt 3 Rw 2 Desa Karang Sari Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Wringin Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			
		Rt 02 Rw 01 Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Karangobar Gunung Desa Karangobar Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			

		Kelurahan Semarang RT. 02/02 Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Slimpet RW. 01/06 Kelurahan Argasoka Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dusun Bakalan Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Beji Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Blok Siwinong Rt 02 Rw 01 Desa Lemahjaya Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt 01 Rw 01 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Blok Siwinong Rt 02 Rw 01 Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt 01 Rw 01 Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Desa Paweden Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	RW 4 Dukuh Sirempu Kelurahan Semampir Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rt 02 Rw 02 Dusun Tiparan Desa Beji Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
3	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan				

	Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha				
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Limbangan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rw 04 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Rw 02 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Pandak Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Rt, 02 Rw. 02 Kelurahan Semarang Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RT 02 RW 6 Kelurahan Parakancangah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RT 01 RW 3 Kelurahan Semarang Kidul			

		Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RW 03 Kelurahan Kalibenda Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara			
		Kembang Widoro Rt 04 RW 03 Kelurahan Rejasa Madukara, Kab. Banjarnegara			
4	Program Pengembangan Perumahan				
	Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota				
	Sub Kegiatan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana / relokasi program kabupaten / kota				
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Deesa Wanadadi, Pingit, Gumingsir, Badakarya, Wanakarsa, Medayu, dan Kandangwangi, Kab. Banjarnegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	
		Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Desa Sikumpul Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara			
6	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Telaah terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara meliputi program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 yakni berfokus pada 5 prioritas utama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim teknologi dan program prioritas meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Visi Kabupaten Banjarnegara “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Kemudian dijabarkan dalam pokok visi dan misi yang diampu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel berikut:

NO	POKOK VISI	MISI	TUJUAN
1	Banjarnegara maju berbasis pertanian	Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

		serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai	
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung misi ketiga dan kelima, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tujuan antara lain:

a. Tujuan Renja DPKPLH:

- Tujuan 1 : meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas
- Tujuan 2 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

b. Sasaran Renja DPKPLH:

- Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan rumah layak huni
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut adalah tabel matriks program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kepmendagri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) 2023	Perkiraan Maju (Rp.000) 2024	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1 03 03					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1 03 03 2.01					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota												
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	98,3%	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dok	Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah	98,3%	100.000	14.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang			110.000	15.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air					Kapasitas Sistem Penyediaan	28,5 Liter/detik			3.000.000	2.618.709	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	

					Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun							pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	32,46 Liter / detik			2.190.000	2.190.000			
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Lokasi			340.000	40.000			
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000 SR			1.000.000	1.000.000			
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													

1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Cakupan akses sanitasi	73%	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi/ air limbah yang memadai	73%	120.000	5.000		
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ / Hari			1.000.000	1.000.000		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	04	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	04	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Meningkatnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Jumlah dokumen yang disusun	13 Dok	15.000	15.000		
1	04	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan					Laporan	6 Dok			20.000	10.000		

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
1	04	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1	04	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Nilai survei kepuasan masyarakat	78,25	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan	Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.804.240	9.446.763					
1	04	1	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok			255.660	100.000					
1	04	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1	04	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	29.999	30.000					
1	04	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik	13 Paket			411.787	424.969					

										Kantor yang Disediakan									
1	04	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1	04	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 Unit	192.050	5.000				
1	04	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1	04	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	37	144.000	147.000				
1	04	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.508.119	2.508.000				
1	04	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1	04	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa					Jumlah Kendaraan	23 Unit	Jumlah Barang milik	25 Unit	1.082.019	850.000				

					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		daerah Penunjang urusan pemerintah daerah								
1	04	1	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi		176.026	84.591					
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota			Persentase penanganan rumah korban bencana	20%	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	1 Dok	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	1 Dok	45.000						
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi LahanLahan Potensial					Identifikasi Lahan-Lahan				-	750.000					

					sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok				20.000			
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang		25.000			
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten	40 Unit				2.000.000	250.000		

										/Kota									
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Lap	Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Lap	30.000					
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			Persen-tase cakupan rumah layak huni	84%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lap	Jumlah izin yang diterbitkan	1 Lap	25.000					
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
1	02	03	2.02	0008	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalis	1 Dok	Jumlah dokumen penyusunan / review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	1 Dok	50.000					

										asi						
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.500 unti	Jumlah RTLH yang dipugar	2.500 unti	3.500.000		
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan			116.118		
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	27 Ha			2.730.000		
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelengg	1 Dok			25.000		

					Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian								
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan			20.000				
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan			50.000				
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN													
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan													

					Kabupaten/Kota					Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota									
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis	1 Dok	150.000					
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			IKLH	68,5	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok			200.000					
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota														
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Persentase luasan RTH yang tertangani	18,5%	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	5,2 Ha	Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5,2 Ha	450.000					
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH														

					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dok	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	20 Dok	76.000		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat			Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	100%	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	18 Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga	150.000		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan	1 Dok			175.000		

										hidup yang dilaksanakan										
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup	75%	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota	18 Entitas	75.000						
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah															
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			Persentase jumlah sampah yang tertangani	33,5%	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan	33,5%	524.333						
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional					Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	270 Ton			2.211.091						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 4. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
Terdiri dari pengadaan :
 - Pengadaan alat besar

- Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan
 - b. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Terdiri dari:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - d. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - f. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 2) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan:
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - c. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
3. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

2) Program Kawasan Permukiman

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan:
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - c. Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh
 - d. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan:

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Perbaiki rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
- 2) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan kegiatan berikut:
 1. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - c. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan berikut:
 1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum PSU tingkat Kemampuan Kecil, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil

3. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:

- a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 2) Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 3) Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan berikut:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan berikut:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:
 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Program Pengelolaan persampahan, dengan kegiatan berikut:
 1. Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Penyelarasan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang sudah diselaraskan bersama OPD terkait. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2024

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. TULUS SUGIHARTO, M.Si
NIP. 19670217 199303 1 010

